

Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Rezkiia Jayanti

Universitas Muhammadiyah Palopo
rezkiakia2@gmail.com

Zikra Supri

Universitas Muhammadiyah Palopo
zikra@umpalopo.ac.id

Riyanti Riyanti

Universitas Muhammadiyah Palopo
riyantirii@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the regional financial performance and economic growth of South Sulawesi Province from 2012 to 2021 because the success of a local government in regulating and funding its area can be seen from its financial performance and economic growth described in Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2015. The method used in this study is a quantitative method using secondary data. In producing the information in this study, ratio measurements were used. There are 3 ratios used, namely the independence ratio, the fiscal decentralization ratio, and the last is the PAD Effectiveness ratio. The results of this study are known that the ratio of independence has no effect and is significant on economic growth, on the ratio of fiscal decentralization with the same result that the ratio of independence has no effect and is significant on economic growth, while the ratio of effectiveness of PAD produces different results, namely the ratio of effectiveness of PAD has an effect and significant to economic growth.

.Keywords : *Independence ratio, Fiscal centralized ratio, PAD effectiveness ratio*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah daerah menetapkan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia”, kemudian dijelaskan juga bahwa dalam Undang-Undang tersebut pemerintah daerah memiliki wewenang yang besar dalam melakukan semua urusan pemerintah, mulai dari perencanaan hingga agama. Dalam penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa urusan pemerintah berada di bawah otoritas pusat (Nurhayati et al., 2022).

Sangat penting untuk mengamati dan mencatat bagaimana operasional pemerintah daerah dilakukan di masing-masing daerah. Keberhasilan suatu pemerintahan sekarang ini dapat dilihat dari berbagai jenis ukuran kinerja yang sudah digapainya. Kinerja APBD merupakan salah satu bentuknya. Dalam hal ini menelaah APBD baik itu dalam hal pendapatan, belanja ataupun mengoperasikannya menjadi sangat istimewa dalam rangka menuju ekonomi daerah yang kuat, salah satunya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Penelitian (Rahmawati, 2019) membahas mengenai pengukuran kinerja pemerintah daerah mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah tahap pendapatan dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, misi dan visi sebuah organisasi yang terdaftar dalam rumusan metode strategis. Dalam hal ini, pekerjaan dilakukan sebagai output atau hasil dari beberapa proyek atau program yang akan segera dimulai atau sudah dimulai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang ditentukan. Terakhir, kinerja sebagai pembanding hasil dengan perencanaan atau objek yang telah selesai. Kinerja keuangan daerah merupakan kriteria dalam menentukan apakah pemerintah daerah harus melaksanakan rencana untuk mencapai strategi keuangannya atau tidak (Ramadhanti & Rahmi, 2022).

Pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya indikator terpenting dari pertumbuhan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan dapat sangat bermanfaat bagi perkembangan wilayah tersebut. Selain itu, data ekonomi dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Karena kondisi ekonomi yang ada, wilayah ini akan menjadi makmur dari segala sudut dan aspek (Darma, 2021).

Aspek yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yaitu pengeluaran pemerintah, karena saat ini Indonesia menganut sistem otonomi daerah dan dalam pelaksanaannya, faktor keuangan menjadi sangat penting dalam menentukan apakah pelaksanaan otonomi daerah berhasil atau tidak, maka pengeluaran pemerintah bisa menjadi tolak ukur besarnya kontribusi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pengerjaan di daerahnya (Wahyudi & Wahyudin, 2020). Sehingga salah satu alasan penulis meneliti atau mengangkat judul ini adalah untuk melihat apakah pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk daerah dalam membiayai daerahnya mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonominya atau tidak. Cara yang digunakan peneliti untuk mengungkapkan hasil tersebut yaitu dengan mencari rasio Rasio Kemandirian, Desentralisasi Fiskal dan Efektifitas PAD sehingga rasio dalam penelitian ini penting.

Adapun dalam Penelitian (Ridho, 2019) yang membahas mengenai kinerja pertumbuhan ekonomi kota Tangerang selatan menghasilkan kesimpulan bahwa “berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi Kota Tangerang Selatan dengan menghitung rasio efektivitas, atau

berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi Kota Tangerang Selatan dengan menghitung rasio efisiensi,” Selain itu, dengan sekaligus berdampak pada rasio kemandirian dan PAD, Kota Tangerang Selatan akan diperluas melalui kinerja keuangan (Yayu & Saipudin, 2022).

Penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisis keadaan kinerja keuangan daerah APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pertumbuhan ekonominya yang dapat ditinjau dari kondisi dan keadaan tahun ke tahun, ataupun ditinjau dari rasio keuangan daerah tersebut.

B. KAJIAN LITERATUR

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis laporan keuangan adalah proses memindahkan laporan keuangan dari satu elemen ke elemen berikutnya dan memisahkan satu sama lain dengan tujuan untuk melakukan analisis yang akurat dan tepat dari transaksi keuangan itu sendiri (Thian, 2022). Laporan keuangan adalah satu-satunya informasi terpenting bagi mereka yang menggunakannya untuk menginterpretasikan keputusan ekonomi. Jika informasi yang terkandung dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, maka perjanjian pinjaman akan lebih menguntungkan. Dengan memperpanjang proses perbandingan laporan keuangan melewati proses evaluasi dan analisis tren, prediksi tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan dapat diketahui.

Sesuai dengan yang tertuang dalam PP No.12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai segala hak beserta kewajiban daerah dalam pelaksanaan dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat di uangkan serta berbagai bentuk lainnya yang dapat dianggap aset daerah yang memiliki keterkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dari pemerintahan daerah itu. Dalam pelaksanaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan tersebut dipegang oleh kepala daerah selaku perwakilan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah.

Penyelenggaraan dan kekuasaan yang dilimpahkan pada tiap-tiap pemerintah pada tingkat daerah membuat pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tiap-tiap daerah. Dengan adanya perbedaan karakteristik dan pengelolaan keuangan di tiap daerah diperoleh kondisi keuangan yang berbeda di masing-masing daerah (Rouffie et al., 2021).

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut penelitian (Halim, 2007) menuliskan dalam bukunya dengan judul Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, dengan menganalisis rasio keuangan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu metode analisis kinerja keuangan daerah untuk mengolah keuangan. Menurut UU Republik Indonesia No 17 Tahun 2003

Pasal 1 mengenai keuangan negara APBD merupakan program keuangan tahunan pemerintah daerah yang diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penelitian ini terdapat 3 Rasio yang akan dipakai dalam mengetahui kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi selatan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah merupakan rasio yang memperlihatkan tingkat atau sejauhmana kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai sendiri pengelolaan kegiatan dan urusan dalam Pemerintahannya. Dalam penelitian (Syam & Zulfikar, 2022), Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi, dengan pajak sebagai komponen utama hak milik asing. Tingkat partisipasi berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat begitu pula sebaliknya.

2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah standar untuk menyampaikan tingkat wewenang dan kewajiban yang diberikan pemerintahan pusat pada pemerintahan daerah untuk mengerjakan pengembangan. Dengan menggunakan tolak ukur rasio PAD terhadap total pendapatan daerah adalah cara menentukan Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini.

3. Rasio Efektifitas PAD

Efektivitas diukur dengan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya, atau gagal melakukannya. Ketika sebuah organisasi mencapai tujuannya, itu menunjukkan bahwa organisasi itu beroperasi secara efektif. Poin penting yang harus diingat adalah bahwa efektivitas tidak berarti bahwa sejumlah besar uang telah dibelanjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mahalizikri et al., 2021). Rasio efektifitas menjelaskan kesanggupan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang dirancang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets yang ditulis dari buku (Jhingan, 2012) yang berjudul Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, mengemukakan menurutnya ada tiga poin penting pertumbuhan ekonomi, yaitu pertama pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari terus bertambahnya pasokan barang, kedua teknologi maju menjadi faktor pertumbuhan ekonomi, dan ketiga adanya inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan. Sehingga mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan jangka panjang dalam keberhasilan suatu negara untuk memperoleh

berbagai jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Keberhasilan ini cocok dengan kemajuan teknologi yang ada sesuai dengan mereka butuhkan..

Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan menggunakan PDRB. PDRB, yaitu totalitas dari keseluruhan nilai barang dan jasa diperoleh dari seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah dikatakan meningkat jika ada peningkatan PDRB dari tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi selalu digunakan sebagai ungkapan umum yang menggambarkan tingkat pembangunan suatu negara yang diukur dengan penambahan pendapatan nasional nyata (Febry et al., 2016).

Hipotesis

Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan

Menggunakan rasio kemandirian dapat diperoleh tingkat kemandirian daerah apakah mampu membiayai daerahnya sendiri atau tidak. Mengetahui rasio kemandirian daerah dapat juga mengetahui pertumbuhan daerah tersebut sehingga rasio kemandirian berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Daerah semakin mandiri dalam mengelola keuangannya pertumbuhan ekonominya semakin semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:

H1: Rasio kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Menggunakan Rasio Desentralisasi Fiskal maka dapat diperoleh apakah terdapat pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal dimaksud adalah ukuran untuk menyampaikan tingkat kepedulian dan komitmen yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan proses pembangunan daerah.

Menggunakan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dapat memperoleh tingkat desentralisasi fiskal. Besarnya hasil pembangunan daerah dapat memperlihatkan hasil tanggung jawab yang sudah terlaksana. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hipotesis dibawah:

H2: Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Pengaruh Rasio Efektifitas PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan

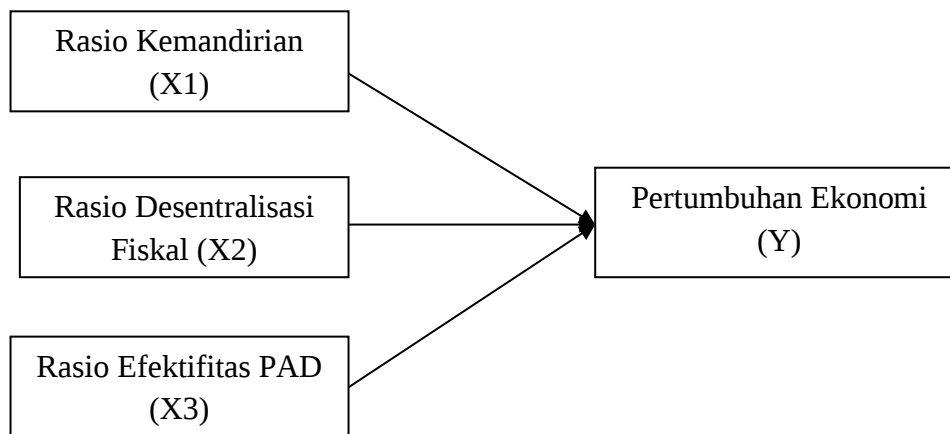
Melalui rasio efektifitas PAD dapat diperoleh apakah terdapat pengaruh rasio efektifitas PAD pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian (Mahalizikri et al., 2021), mengungkapkan bahwa terdapat

pengaruh rasio efektifitas PAD pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan dana PAD yang berasal dari APBN oleh pemerintahan dialokasikan untuk memodali kegiatan daerah dalam mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Besar pendapatan asli daerah dapat ditunjukkan bahwa daerah mampu mengola dan menggunakan dana dari pusat secara baik. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan tahunan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah untuk mengelolah daerahnya. Berdasarkan penjelasan ini dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:

H3: Rasio Efektifitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

C. METODE

Data sekunder kuantitatif merupakan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini dimana data sekunder kuantitatif merupakan data yang didapat dengan cara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk angka. Mengumpulkan data diperlukan deret waktu untuk memperoleh hasil data. Adapun data analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2012-2021. Penelitian ini bersumber dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan situs website www.djpk.depkeu.go.id, yang dipublikasikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah. Kemudian diolah dengan memanfaatkan aplikasi Program IBM Statistics SPSS 21.

Defenisi Operasional Variabel

1. Rasio Kemandirian (X1)

Berikut rumus untuk mengetahui tingkat kemandirian yaitu:

$$RK = \frac{PAD}{DANA TRANSFER} \times 100\%$$

2. Rasio Desentralisasi Fiskal (X2)

Berikut rumus untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :

$$RDF = \frac{PAD}{TOTAL PENDAPATAN DAERAH} \times 100\%$$

3. Rasio Efektifitas PAD (X3)

Rumus yang digunakan dalam Rasio Desentralisasi Efektifitas PAD yaitu:

$$R EFEK = \frac{REALISASI PENERIMAAN PAD}{ANGGARAN PAD} \times 100\%$$

4. Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Adapun rumus yang digunakan dalam rasio pertumbuhan yaitu:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

r = rasio pertumbuhan

pn = total pendapatan daerah yang dihitung pada tahun ke-n

po = total pendapatan daerah yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	412,833,518
Most Extreme Differences	Absolute	0,228
	Positive	0,228
	Negative	-0,154
Kolmogorov-Smirnov Z		0,721
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,677

Data diolah, 2022

Menguji normal atau tidaknya distribusi data adalah uji normalitas. Dikatakan normal jika data yang tersebar atau bisa mewakili populasi (Sujarweni, 2016). Pengujian ini menggunakan *one-sample kolmogorov-smirnov test*. Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh hasil *asympt. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,677 > 0,05$ maka bisa disimpulkan yaitu nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
RASIO KEMANDIRIAN	,261	3,827
RASIO DESENTRALISASI FISKAL	,259	3,865
RASIO EFEKTIFITAS PAD	,835	1,198

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil data di atas dapat dijelaskan bahwa nilai VIF lebih dari sepuluh kemudian Tolerance lebih dari 0,01 maka dapat kesimpulan dengan tegas adalah tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Hasil Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2012-2021

TAHUN	ANGGARAN PAD (Rp)	REALISASI (Rp)	BELANJA (Rp)	PENDAPATAN (Rp)
2012	112.744.000.001	646.182.000.000	617.463.000.000	577.051.000.000
2013	4.205.000.000	25.152.000.000	25.438.000.000	24.358.000.000
2014	180.675.000.000	835.191.000.000	856.241.000.001	797.865.000.001
2015	215.080.000.000	903.374.000.000	617.463.000.000	894.010.000.001
2016	229.399.000.000	1.003.137.000.000	1.094.749.000.001	1.033.990.000.001
2017	243.006.000.000	1.078.567.000.001	1.098.661.000.001	1.051.337.000.000
2018	8.596.000.001	41.416.000.001	43.901.000.001	42.945.000.000
2019	9.185.000.000	43.543.000.000	45.134.000.000	44.428.000.000
2020	9.902.000.001	41.945.000.000	46.610.000.001	45.520.000.001
2021	10.275.000.001	42.352.000.001	48.643.000.001	44.926.000.001

Sumber data diolah 2022

a. Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari Rasio Kemandirian

Berikut adalah tabel tentang rasio kemandirian dengan pola hubungan keuangan Pemerintah:

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah	0 – 25%	Instruktif
Rendah Sekali	> 25-50%	Konsultatif
Sedang	>50-75%	Partisipatif
Tinggi	>75-100%	Delegatif

(Halim, 2007)

Berdasarkan temuan penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang tersedia, maka tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021

Tahun	Pad (rp)	Dana transfer (rp)	Rasio kemandirian %	Keterangan	Pola hubungan
2012	112.744.000.001	380.983.000.001	29,59	Rendah Sekali	Konsultatif
2013	4.205.000.000	16.415.000.001	25,61	Rendah Sekali	Konsultatif
2014	180.675.000.000	482.186.000.000	37,46	Rendah Sekali	Konsultatif
2015	215.080.000.000	499.969.000.000	43,01	Rendah Sekali	Konsultatif
2016	229.399.000.000	736.683.000.000	31,13	Rendah Sekali	Konsultatif
2017	243.006.000.000	736.457.000.000	32,99	Rendah Sekali	Konsultatif
2018	8.596.000.001	31.120.000.001	27,62	Rendah Sekali	Konsultatif
2019	9.185.000.000	31.927.000.000	28,76	Rendah Sekali	Konsultatif
2020	9.902.000.001	32.105.000.001	30,84	Rendah Sekali	Konsultatif
2021	10.275.000.001	31.055.000.001	33,08	Rendah Sekali	Konsultatif
Rata-rata			32,01%		

Dari data diatas dapat dijelaskan untuk periode tahun 2012-2020 kemampuan keuangannya diklasifikasikan rendah sekali dengan pola hubungan konsultatif, dimana dari periode tahun ke tahun tidak mengalami perubahan . Adapun rata-rata tingkat kemandirian Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2012-2021 sebesar 32,01% . Dapat disimpulkan tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan rendah sekali dimana tidak dapat membiayai sendiri penyelenggaraan kegiatan dan urusan dalam Pemerintahannya.

b. Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari Rasio Desentralisasi Fiskal

Berikut ini kriteria penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal:

Presentase	Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
50,00 >50,00	Sangat Baik

Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

Berdasarkan hasil penemuan penulis dengan menggunakan data-data sekunder yang tersedia, maka tingkat Rasio Desentralisasi Fiskal keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2012-2021

TAHUN	PAD (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	RASIO DF (%)	KETERANGAN
2012	112.744.000.001	577.051.000.000	19,53	Sangat Kurang
2013	4.205.000.000	24.358.000.000	17,26	Sangat Kurang
2014	180.675.000.000	797.865.000.001	22,64	Sedang
2015	215.080.000.000	894.010.000.001	24,05	Sedang
2016	229.399.000.000	1.033.990.000.001	22,18	Sedang
2017	243.006.000.000	1.051.337.000.000	23,11	Sedang
2018	8.596.000.001	42.945.000.000	20,01	Sedang
2019	9.185.000.000	44.428.000.000	20,67	Sedang
2020	9.902.000.001	45.520.000.001	21,75	Sedang
2021	10.275.000.001	44.926.000.001	22,87	Sedang
Rata-rata			21,41%	

Perhitungan hasil dari rasio desentralisasi fiskal diatas dapat menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan otonomi daerah selama tahun 2012-2013 Sangat Kurang dan tahun 2014-2021 hanya Sedang, lalu rata-rata tingkat desentralisasi fiskalnya sebesar 21,41%.

c. Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari Rasio Efektifitas PAD

Berikut ini Kriteria Penilaian Efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah) :

Presentase	Efektifitas
>100	Sangat Efektif
100	Efektif

90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

(Mahmudi, 2016)

Hasil penemuan penulis dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, maka tingkat Rasio Efektifitas PAD keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 4. Rasio Efektifitas PAD Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021

TAHUN	REALISASI PENERIMAAN PAD (Rp)	ANGGARAN PAD (Rp)	EFEKTIFITAS (%)	KETERANGAN
2012	131.827.000.000	112.744.000.001	116,92	Sangat Efektif
2013	4.364.000.000	4.205.000.000	103,78	Sangat Efektif
2014	200.544.000.000	180.675.000.000	110,99	Sangat Efektif
2015	215.376.000.001	215.080.000.000	100,13	Efektif
2016	229.340.000.000	229.399.000.000	99,97	Cukup Efektif
2017	274.032.000.001	243.006.000.000	112,76	Sangat Efektif
2018	8.168.000.000	8.596.000.001	95,02	Cukup Efektif
2019	8.774.000.000	9.185.000.000	95,52	Cukup Efektif
2020	8.381.000.000	9.902.000.001	84,63	Kurang Efektif
2021	8.812.000.001	10.275.000.001	85,76	Kurang Efektif
		Rata-rata	100,55%	

Berdasarkan hasil penelitian di atas efektivitas PAD Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2014 Sangat Efektif, tahun 2015 Efektif, tahun berikutnya Cukup Efektif, 2017 Sangat Efektif, kemudian tahun 2018-2019 Cukup Efektif, tahun 2020-2021 Kurang Efektif. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas PAD termasuk dalam golongan Efektif dengan rata-rata akhir 100,55%.

d. Pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2021

TAHUN	Pertumbuhan ekonomi (%)
2012	8,39
2013	7,62
2014	7,45
2015	7,19
2016	7,42
2017	7,23
2018	7,04
2019	6,91

2020	-0,71
2021	4,65
Rata-rata	6,31

Dari data di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2021 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonominya sebesar 8,39% kemudian tahun 2013-2019 pertumbuhan ekonominya tidak jauh beda rata-rata sebesar 7,32%, tahun 2020 mengalami penurunan sangat rendah senilai -0,71 hal ini dikarenakan Covid-19 dan tahun 2020 mulai mengalami kenaikan sebesar 4,65% sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012-2021 sebesar 6,31%.

Hasil Pengujian Hipotesis

a. Hasil uji t

coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.435	29.836		0.383	0.715
	RASIO KEMANDIRIAN	0.446	0.65	0.27	0.686	0.518
	RASIO DESENTRALISASI FISKAL	-2.906	1.624	-0.708	-1.79	0.124
	RASIO EFEKTIFITAS PAD	0.458	0.17	0.595	2.703	0.035

Data diolah, 2022

Dari tabel di atas dilihat bahwa Nilai konstan positif sebesar 11.435 menunjukkan pengaruh positif variabel independen (Rasio kemandirian, Rasio desentralisasi fiskal, Rasio efektifitas PAD)

1. H1 Rasio kemandirian nilainya 0.518 > 0.05 jadi Berdasarkan ini ditarik kesimpulan tidak terdapat pengaruh Rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi
2. H2 Rasio desentralisasi fiskal nilainya 0.124 > 0.05 jadi berdasarkan ini ditarik kesimpulan tidak terdapat pengaruh Rasio desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi
3. H3 Rasio efektifitas PAD nilainya 0.035 < 0.05 jadi berdasarkan dasar pengambilan keputusan terdapat pengaruh rasio efektifitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi ini.

b. Hasil uji f atau Simultan

Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F		Sig.
1	Regression	478.654	3	159.551	6.241		0.028
	Residual	153.385	6	25.564			
	Total	632.038	9				

Data diolah 2022

F hitung tabel diatas 6.241 dengan signifikan <0.05 sebesar 0.028 kesimpulannya rasio kemandirian, desentralisasi fiskal, dan efektifitas PAD memiliki pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

c. Uji koefisien determinasi(R^2)

Model summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.87	0.757	0.636	5.0561

Data diolah, 2022

Hasil tabel menunjukkan nilai *R Square* 0,757 , jadi rasio efektifitas PAD, rasio kemandirian, dan rasio desentralisasi fiskal memiliki pengaruh sebesar 75,7% pada pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2021. Sedangkan 24,3% terpengaruhi variabel lain.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Rasio Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada penelitian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari Rasio Kemandirian didapatkan bahwa kemandirian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2021 menunjukkan hasil sangat rendah sebesar 32,01% rata-ratanya. Adapun pengaruh rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari hasil statistik yang diolah menunjukkan bahwa signifikan rasio kemandirian menghasilkan nilai $0.518 > 0.05$, ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih bergantung pada pemerintah untuk mendanai sendiri penyelenggaraan kegiatan dan urusan dalam Pemerintahan.

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian (Mahalizikri et al., 2021), (Akhmad et al., 2019), dan (Kumpangpune, 2019) kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan masih rendahnya kemandirian daerah dan

ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan dari pemerintah pusat. Ketika suatu daerah mulai beroperasi secara lebih mandiri maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Penelitian penulis tidak selaras dengan penelitian dengan (Siregar & Junawan, 2022) dan (Linawati & Suhardi, 2017) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena rasio kemandirian yang diteliti termasuk dalam kategori sedang dalam mendanai daerahnya.

Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada hasil penelitian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari rasio desentralisasi fiskal dihasilkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2012-2021 adalah sedang dengan rata-rata 42,72% . Kemudian pengaruh rasio desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari hasil statistik yang diolah menunjukkan bahwa signifikan rasio desentralisasi fiskal dihasilkan nilai $0.124 > 0.05$, berarti tidak terdapat pengaruh rasio desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan tingkat kewenangan dan tanggung jawab daerah ini masih belum tercapai dalam membangun pembangunan yang diberikan pemerintahan pusat karena seperti yang diketahui bahwa pemerintah memberikan komitmen dan tanggung jawab dalam membangun daerahnya.

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian (Taher et al., 2022), dan (Astuti, 2015) desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan menunjukkan bahwa derajat desentralisasifiskal berpengaruh negative pada pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan apabila tanggung jawab yang diberikan tidak tercapai maka tidak dicapainya desentralisasi fiskal.

Penelitian ini tidak selaras pada penemuan (Faridi, 2011) dan (Alisman, 2020) menghasikan desentralisasi fiskal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi karena pembangunan yang ingin dicapai pemerintah dalam penelitian ini berhasil dicapai sehingga desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Rasio Efektifitas Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pada penelitian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari Rasio Efektifitas PAD mendapatkan hasil tingkat Efektifitas PAD daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2012-2021 efektif dengan rata-rata 100,55%. Adapun Pengaruhnya dilihat dari hasil statistik yang diolah memperlihatkan bahwa signifikan Rasio Efektifitas PAD ditemukan nilai $0.035 < 0.05$, berarti terdapat pengaruh rasio Efektifitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dikarenakan dana PAD yang berasal dari APBN oleh pemerintah dialokasikan dalam memodali pembangunan daerah agar meningkatkan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah. Besarnya pendapatan asli daerah

dapat ditunjukkan bahwa daerah mampu mengelola dan menggunakan dana yang diberikan pemerintah pusat dengan baik.

Penelitian selaras pada penelitian (Mahalizikri et al., 2021), (Susanto, 2019) dan (Sri Astuty Ratnasari Manggu, 2019) dimana secara positif terpengaruh dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Disebabkan tingkat kemampuan daerah yang cukup baik dalam mengelola pendapatan asli daerah yang direncanakan dibanding dengan potensi riil daerah yang sudah ditentukan.

Penelitian ini tidak selaras dengan penelitian (Akhmad et al., 2019) dan (Azimi, 2020) dimana hasil penelitiannya menghasilkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini dana tidak digunakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Karena efektifitas PAD akan tercapai apabila dana PAD dialokasikan dengan baik dan benar.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pemerintah daerah memiliki wewenang yang besar dalam melaksanakan urusan pemerintah. Sangat penting mengamati bagaimana operasional pemerintah daerah karena keberhasilan suatu pemerintah dapat dilihat dari kinerja yang digapainya. Adapun pertumbuhan ekonomi merupakan hal penting dari pertumbuhan suatu daerah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kinerja keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rasio kemandirian dan Rasio Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Sedangkan Rasio Efektifitas PAD berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Rasio kemandirian, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Efektifitas PAD.

2. Saran

Bagi penulis selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama dengan ini, dapat diharapkan mencari rasio baru yang tidak terdapat dalam penelitian ini, kemudian memperluas dan menambah variabel yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi serta memperpanjang periode tahun lagi sehingga dapat menjelaskan secara luas dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, N. I., Bado, B., & Alam, S. (2019). *Analisis Kemandirian dan Kemampuan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Gowa*. 1–9.
- Alisman. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah

Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal EMT KITA*.

- Astuti. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Azimi, A. (2020). Analisis Perbandingan Efisiensi, Efektivitas Dan Kemampuan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah Di Kabupaten/Kota Propinsi Kalimantan Barat. *Jkubs*, 1(1), 92–109.
- Darma, B. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tebo Tahun 2016-2020. *Citra Ekonomi*, 5(1), 90–100.
- Faridi. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic rowth: 148 Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*.
- Febry, C., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhaap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(02), 243–254.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Selemba empat.
- Jhingan, M. . (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Linawati, & Suhardi. (2017). Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Moderasi Alokasi Belanja Modal. *Ekuivalensi*, 3(2), 19–28.
- Mahalizikri, I. F., Mashuri, & Ahardi. (2021). Pengaruh Kemandiran Keuangan Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) an Efisien Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011-2020. *Journal of Management, Accounting, Economic and Business*, 03(04), 537–542. <https://doi.org/https://trianglesains.makarioz.org/>
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Upp Stim Ykpn.
- Nurhayati, N., Jubaedah, & Mulyantini, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat. 7(7).
- Rahmawati, S. I. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabuaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1–16.
- Ramadhanti, H., & Rahmi, D. (2022). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 – 2019. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 480–487. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4626>
- Ridho. (2019). Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang selatan. *Jurnal Akuntansi*.
- Rouffie, R. M., Primastuti, A., & Riswati. (2021). Analisi Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. 9(2), 36–51. <https://doi.org/https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP>
- Siregar, O. K., & Junawan. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi (Studi Kasus 32 Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara). *Scenario (Seminar of Social ...*, 58, 138–150.
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/4194%0Ahttps://journal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/download/4194/3797/>

Sri Astuty Ratnasari Manggu. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene. *Jurnal AKRAB JUARA*, 4(1), 45–55.

Sujarweni. (2016). *Penelitian Akuntansi SPSS*. Pustaka Baru Press.

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92.
<https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>

Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>

Taher, A. R., Sahwan, & Wagey, M. E. J. (2022). *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi (Survey pada Kantor BKAD Kabupaten Sigi)*. 3(2), 88.

Thian, A. (2022). *Analisis laporan keuangan*. Andi Offset.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 Tentang Pengolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003 Pasal 1 Mengenai Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyudi, M. R., & Wahyudin. (2020). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2016–2020*. 1187–1196.

Yayu, & Saipudin. (2022). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kotabaru*. 5(1), 515–428.